

RINGKASAN

Karena melekatnya privilege dan imunitas pada jabatan diplomat, maka bila suatu saat terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota perwakilan asing, maka asas teritorial yang mendasari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjadi tumpul. Menurut informasi, tindak pidana penyelundupanlah yang paling sering melibatkan awak korps diplomatik. Tapi karena yang bersangkutan hampir selalu berlindung pada kekebalan yang melekat pada jabatannya, mereka ini akhirnya menjadi tak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan pidana Indonesia. Sebaliknya hanya para pembantu yang mendukung penyelundupan dengan label diplomatik sajalah yang dapat dijatuhi sanksi. Dan mereka ini tidak lain adalah warganegara Indonesia. Dengan demikian ada suatu divergensi antara undang-undang yang seharusnya berlaku dengan pelaksanaan sehari-harinya.

**J U D U L : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYELUNDUPAN
YANG MELIBATKAN FASILITAS ANGGOTA KORPS DIPLOMATIK :
SEBUAH STUDI MENGENAI DIVERGENSI ANTARA KEWAJIBAN HUKUM
DAN PELAKSANAANNYA DALAM KENYATAAN.**

A U T O R : Dra. Suhartati Hidayat.

FAKULTAS : Hukum Universitas Airlangga.